

DPR Desak Pengusutan Oknum yang Bermain dalam Jual Beli KTP WNA di Bali

JAKARTA Dua warga negara asing (WNA) yakni RK (37) asal Ukraina dan MZN (31) asal Suriah tertangkap usai terlibat transaksi jual-beli KTP dan Kartu Keluarga (KK) berkewarganegaraan Indonesia. Diketahui, mereka membayar senilai Rp8 juta-Rp10 juta untuk proses pembuatan KTP selama satu minggu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Denpasar. **BACA JUGA:** Terkait insiden ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni dengan tegas meminta Direktorat Jenderal Imigrasi dan kepolisian, khususnya Polda Bali untuk mengusut tuntas kasus dugaan jual-beli identitas kewarganegaraan ini beserta oknum-oknum yang terlibat. Politikus Nasdem ini meyakini bahwa ada lebih dari dua kasus serupa yang belum terungkap. **BACA JUGA:** Saya minta imigrasi dan Polda Bali bertindak tegas tangani kasus ini. Jangan sampai jual-beli kewarganegaraan ini dibiarkan begitu saja dan dianggap hal lumrah. Banyak sekali resiko jangka panjang jika hal tersebut dibiarkan. Jadi tolong usut oknum-oknum yang diduga bermain, baik itu di desa, kecamatan, hingga Dukcapil. Sebab saya juga tidak yakin jika hanya ada dua (kasus), kebetulan saja itu yang baru terbongkar, kata Sahroni kepada wartawan yang dikutip Selasa (14/3/2023). Sahroni pun sangat menyayangkan para oknum yang dengan sengaja menjual identitas kewarganegaraan Indonesia dengan murah, hanya dengan sejumlah uang. Selain itu, Sahroni juga menyoroti terkait maraknya aksi semena-mena WNA di Pulau Dewata belakangan ini, seperti saat berkendara juga memprotes kokokan ayam milik warga lokal di pagi hari. Untuk itu, ia meminta agar para turis tetap patuh terhadap seluruh aturan hukum yang berlaku di Indonesia tanpa terkecuali. Belakangan ini juga marak sekali para turis melakukan hal semena-mena di Bali. Tanpa mengurangi esensi kenyamanan berwisata, saya kira kepolisian tetap harus tegas dan tertib soal aturan, mau itu soal berkendara, identitas, dan lain sebagainya. Beri sosialisasi soal aturan hukum di Indonesia kepada mereka (WNA). Jadi kalau sudah begitu, jangan sampai ada perbedaan perlakuan antara turis lokal dan luar, tidak baik nantinya, tandas Sahroni.